



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 40 TAHUN 2025**

**RENCANA KERJA
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
TAHUN 2026**

Pangkalan, September 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Renja PD ini dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian program dan kegiatan pada tahun perencanaan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) PD. Dalam penyusunannya, Renja PD ini disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

Akhirnya, kami berharap semoga Renja Tahun 2026 ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Kecamatan Pangkalan Koto Baru khususnya dan bermanfaat bagi yang memerlukannya untuk menjadi bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.

Pangkalan, September 2025

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

YUDHI SAPUTRA, SE,M.AP

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19800617 200501 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	30
3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV : RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	38
BAB V : PENUTUP	52
5.1 Catatan Penting	52
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	52
5.3 Rencana Tindak lanjut	53

Daftar Tabel

		Halaman
Tabel	Kalender Rencana Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026	3
Tabel	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2024	11
Tabel	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	14
Tabel	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota	21
Tabel	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	29
Tabel	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029	31
Tabel	Program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	33
Tabel	Rancangan Awal Renja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	35
Tabel	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	37
Tabel	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026	39
Tabel	Rencana Keptuhan Pendanaan berdasarkan urusan, jumlah program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 merupakan Renja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Renja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renja Pemerintah Daerah serta

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Proses Penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 tetap memperhatikan program prioritas yang dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Akhir Renja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 dilandasi oleh semangat otonomi Daerah Dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah Menurut azas Otonomi dan azas dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keaneka ragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung perencanaan Pembangunan Daerah , Sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pemerintah bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten



Lima Puluh Kota Tahun 2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

Dalam melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Kecamatan Pangkalan Koto Baru melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai berikut :

- I. Persiapan penyusunan;
 - II. Penyusunan Rancangan Akhir;
 - III. Penyusunan rancangan;
 - IV. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
 - V. Perumusan rancangan akhir dan
 - VI. Penetapan
- I. Persiapan penyusunan meliputi :
- a. Mengusulkan nama-nama personil yang akan mengisi Struktur Organisasi Tim Penyusunan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2026 ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan Renja.
 - b. Mengadakan orientasi penyusunan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang melibatkan seluruh anggota tim penyusunan Renja sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/437/BUP-LK/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Renja Perangkat daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tata cara, kaidah serta jadwal penyusunan Renja.
 - c. Penyiapan data dan informasi perencanaan berdasarkan SIPD RI.
 - d. Kalender Penyusunan Renja

Demi kelancaran dan ketepatan jadwal penyusunan maka disusun Kalender Penyusunan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2026.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 disusun sebagaimana disajikan pada tabel 1.1 di halaman berikut :

Tabel 1.1
Kalender Rencana Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2024				2025																															
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
A	Persiapan Penyusunan Rancangan Akhir Renja 2026																																				
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																				
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																				
3	Orientasi mengenai Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru																																				
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah																																				
B	Penyusunan Rancangan Akhir Renja 2026																																				
1	Penyusunan Rancangan Akhir Renja 2026																																				
2	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik																																				
3	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD																																				
4	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Forum PD dan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah																																				
C	Penyusunan Rancangan Renja																																				
1	Penyusunan Rancangan Renja																																				
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																				
3	Verifikasi Renja oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja PD sudah selaras dengan Rancangan Akhir RKPD																																				
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																				



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2024				2025																															
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
D	Perumusan Rancangan Akhir Renja																																				
1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk memperoleh masukan dan saran dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah																																				
E	Perumusan Rancangan Akhir Renja																																				
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan Akhir Renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD																																				
F	Penetapan Renja																																				
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																																				
2	Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja setelah diverifikasi																																				
3	Penyampaian kembali Rancangan Akhir Renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																																				
4	Penyampaian Rancangan Akhir Renja semua PD oleh Bapelitbang kepada KD melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																																				
5	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD se-Kabupaten Lima Puluh Kota																																				



II. Penyusunan Rancangan Akhir Renja

Pada awal bulan Desember 2024 mulai dilakukan penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 oleh tim penyusun rencana kerja tahun 2026 dan hasil evaluasi rencana kerja tahun 2024. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja tahun lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup

III. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Renja yang telah disempurnakan akan menjadi Rancangan Renja dan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disempurnakan berdasarkan masukan dan berita acara forum tersebut. Rancangan Renja yang telah disempurnakan akan diverifikasi oleh Bappelitbangda untuk melihat kesesuaian dan keselarasan antara Rancangan Renja dengan Rancangan Akhir RKPD dan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan ini menjadi Rancangan RKPD.

Dalam pembahasan Rancangan RKPD harus dilakukan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi yang secara tidak langsung juga akan selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.

Forum Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalan Koto Baru dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 di Aula Mess Pemda di Pangkalan yang dihadiri oleh perangkat daerah terkait dan nagari yang ada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

IV. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

V. Penetapan

Dalam hal penetapan Renja, Kecamatan Pangkalan Koto Baru melakukan pemeriksaan akhir dan koordinasi dengan Bappelitbangda tentang Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 dilakukan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 000.7.2.4/041/5/Bappelitbangda-LK/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan Pra RKA Tahun 2026. Rancangan Akhir Renja tersebut disusun oleh Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/437/BUP-LK/XII/2024 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio*. Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah tersebut dibekali dengan orientasi dan penyatuan persepsi terhadap penyusunan rencana tahunan perangkat daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lain, baik yang telah ditetapkan maupun dokumen perencanaan yang sedang disusun. Keterkaitan ini tidak hanya dengan rencana pembangunan strategis daerah dan perangkat daerah yang telah ditetapkan, namun juga dengan rencana tahunan daerah (RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota) dimana Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah disempurnakan berdasarkan Forum Konsultasi Publik adalah acuan untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 menjadi Rancangan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 untuk kemudian dibahas dalam forum OPD/ lintas OPD yang dilaksanakan pada bulan Februari 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2)
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pembuatan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 ini adalah untuk :

- 1) Untuk menjabarkan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2021-2026 dan Pedoman Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026
- 2) Untuk memberikan gambaran program/kegiatan Pemerintahan, pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026.
- 3) Untuk memberikan gambaran tentang target kinerja yang akan dicapai tahun 2026
- 4) Sebagai Pedoman dan acuan pembuatan RKA/ DPA Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Tahun 2026 ini terdiri dari Lima Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landas Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Tulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- 2.5 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru
 - 3.3 Program dan Kegiatan.

- BAB IV RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1 Rencana Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2021-2026, visi Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang dikritisalisasi dari visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah “Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai Keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi sektoral yang memiliki keunggulan tingkat lokal dan regional.
3. Meningkatkan potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi birokrasi.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2026 melaksanakan 4 urusan yaitu;

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Keempat urusan pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru dijabarkan dalam 3 Program dan diimplementasikan dalam 9 bentuk kegiatan. Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun Anggaran 2024 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) (Tahun 2024)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 7 + 9	11 = (10 / 4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	70	69,75	67	67,70	101,04	68	135,70	1,94
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	69,75	67	67,70	101,04	68	135,70	1,94
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	69,75	67	67,70	101,04	68	135,70	1,94
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	69,75	67	67,70	101,04	68	135,70	1,94
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	69,75	67	67,70	101,04	68	135,70	1,94
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	69,75	67	67,70	101,04	68	135,70	1,94

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (Tahun 2024)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10= 7 + 9	11 = (10 / 4)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	69,75	67	67,70	101,04	68	135,70	1,94
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	100%	100%	80 %	100%	125%	100 %	200	2%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat	100%	100 %	80%	100 %	125 %	100%	200	2%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat	100%	100 %	80%	100 %	125 %	100%	200	2%
7.01.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,30	90,89	96,20	90,89	94,48	96,25	187,14	1,94
7.01.06.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,30	90,89	96,20	90,89	94,48	96,25	187,14	1,94

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2024 dan realisasi Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2024 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor yang tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target Kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD, yang disesuaikan menurut OPD masing-masing, dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

NO	Indikator	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	v	67	68	67	68	67,70	65,75	67	68	- Target dan Realisasi Capaian Tahun 2024-2025 berdasarkan Renstra 2021-2026 - Target dan Proyeksi Tahun 2026-2027 berdasarkan Renstra 2025-2029
2	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	v	80%	100%			100%	100%	-	-	Target dan Realisasi Capaian Tahun 2024-2025 berdasarkan Renstra 2021-2026
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	v	96,20	96,25	91,30	91,50	90,89	90,89	91,30	91,50	- Target dan Realisasi Capaian Tahun 2024-2025 berdasarkan Renstra 2021-2026 - Target dan Proyeksi Tahun 2026-2027 berdasarkan Renstra 2025-2029
4	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	v	-	-	-	70	-	-	-	70	- Target dan Proyeksi Tahun 2026-2027 berdasarkan Renstra 2025-2029
5	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	v	-	-	-	70	-	-	-	70	- Target dan Proyeksi Tahun 2026-2027 berdasarkan Renstra 2025-2029
6	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	v	-	-	81	82	-	-	81	82	- Target dan Proyeksi Tahun 2026-2027 berdasarkan Renstra 2025-2029
7	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	v	-	-	60	70	-	-	60	70	- Target dan Proyeksi Tahun 2026-2027 berdasarkan Renstra 2025-2029

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD. Kecamatan Pangkalan Koto Baru sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru, ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pelayanan Publik Masih belum maksimal.
- 2) Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi proses efektifitas pelayanan.
- 4) Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta dan stakeholders yang masih rendah.
- 5) Kurang terfasilitasinya Lembaga Agama, Adat dan Budaya di Masyarakat
- 6) Bimtek-bimtek dan sosialisasi untuk penyelenggaraan pemerintahan nagari tidak bisa dilaksanakan karna kurangnya pendanaan untuk kecamatan.
- 7) Ada Nagari yang tidak menetapkan APB-Nagari Tepat waktu
- 8) Keberadaan BUMNAG sekedar untuk memenuhi tuntutan peraturan tapi tidak dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kecamatan

Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk UU Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, kebijakan ini bertujuan memaksimalkan pelayanan pemerintah sehingga menciptakan iklim pelayanan prima pada setiap instansi pemerintah.

Kinerja pelayanan publik dan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari siapa yang ada dan menjalankan organisasi tersebut, tidak lain adalah manusia itu sendiri. Sebagai unsur organisasi, manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya dalam rangka kemajuan organisasi. Potensi setiap individu yang ada dalam organisasi harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kemampuan para pegawai negeri sipil itu sendiri. Pegawai negeri sipil mempunyai peranan yang menentukan yaitu sebagai pemikir, pelaksana, perencana, dan pengendalian pembangunan, dengan demikian pegawai negeri sipil mempunyai peranan yang sangat penting dalam



memperlancar jalannya roda pemerintahan dan pembangunan nasioanal termasuk di Kantor Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Beberapa jenis pelayanan yang diberikan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah pemberian Registrasi terhadap surat-surat Kependudukan, seperti Register Legalisasi, Pernyataan Domisili, Keterangan Meninggal Dunia, ahli waris, proposal beasiswa, izin usaha, lokasi usaha, surat pindah, SKTM, dispensasi Nikah, dan surat-surat keterangan lainnya.

Pelayanan Selanjutnya adalah berkaitan dengan pelaksanaan amanat PP Nomor 43 Tahun 2014, Pemendagri Nomor 73 Tahun 2020, dan Perbup Nomor 151 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Rancanagan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Kepada Camat.

Selain itu dalam pelayanan terdapat Pemerintahan Nagari Pihak Kecamatan melakukan Pembinaan kepada Pemerintahan Nagari dengan melakukan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Nagari/Peraturan Wali Nagari, Administrasi Nagari, Perencanaan Pembangunan Nagari dan Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan.

Pelayanan yang diberikan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru kami akui masih belum maksimal. Belum maksimalnya pelayanan yang diberikan disebabkan oleh aspek pendukungnya belum sesuai dengan harapan masyarakat, seperti efisiensi berkaitan dengan kurangnya disiplinnya pegawai yang terlambat datang ke kantor serta sarana dan prasarana penunjang belum memadai.

2.3.2. Permasalahan yang ada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

- a) Dana Desa/Nagari yang telah mulai dikurcurkan pada Tahun Anggaran 2015 yang lalu berdampak semakin tingginya beban kerja Wali Nagari bersama dengan aparatur yang ada di nagari. Minimnya SDM dan kurangnya pemahaman aparatur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa ini terutama dalam penatausahaan keuangan, mewajibkan pemerintah yang lebih atas/OPD terkait dapat hendaknya mengadakan pelatihan/bimbingan teknis kepada Wali Nagari dan aparaturnya.
- b) Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan.
- c) Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d) Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

- e) Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
- f) Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

2.3.3. Dampak

Dalam merencanakan strategi dan menganalisis suatu masalah, kita seringkali melihat beberapa faktor yang hadir di sekitar masalah tersebut lalu memetakannya satu per satu. Dari pemetaan hal-hal yang hadir dari rencana maupun permasalahan tersebut, maka secara perlahan kita akan menemukan rencana yang tepat maupun cara penyelesaian masalah yang kita hadapi itu sendiri.

Cara merencanakan sebuah strategi maupun menganalisis suatu persoalan, khususnya dalam bidang pemerintahan, akan lebih mudah apabila kita menemukan cara yang tepat dalam proses menganalisisnya. Penggunaan metode perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang tepat akan mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Salah satu cara terbaik yang dapat kita gunakan adalah memanfaatkan metode yang disediakan melalui rangkaian tahap dalam analisa SWOT.

Analisa SWOT adalah singkatan yang berasal dari empat elemen dalam metode analisis ini, kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman. Dengan demikian, analisa SWOT dapat kita artikan sebagai sebuah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk keperluan kegiatan tertentu atau suatu proyek. Metode ini menekankan pada peningkatan peran faktor internal maupun faktor eksternal guna menyusun strategi perencanaan ide dan penyelesaian masalah secara efektif.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru menggunakan analisis S.W.O.T dengan proses sebagai berikut:

Kekuatan dari Lingkungan Internal yakni:

- Visi dan misi yang jelas.
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan (Anggaran rutin) Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan.
- Adanya sarana-prasarana.

Kelemahan dari lingkungan Internal yakni:

- Jumlah dan kualitas SDM yang masih kurang.
- Penempatan SDM yang belum tepat sasaran.
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya.
- Sarana dan prasarana kurang.
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan.
- Belum lahirnya SOP secara optimal dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi.

- o Belum tepat sasaran sosialisasi setiap regulasi yang lahir kepada masyarakat.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Tantangan dari Lingkungan Ekternal

- o Prasarana wilayah yang masih rendah dan belum memadai.
- o Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
- o Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.
- o Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.
- o Belum tersedia anggaran yang cukup.
- o Tidak seimbangnya birokrasi pemerintahan legislative dan eksekutif di wilayah Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Peluang dari Lingkungan Ekternal

- o RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.
- o Agenda pembangunan Tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota
- o Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.
- o Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- o Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan.
- o Dukungan dan partisipasi masyarakat luas.
- o Diklat peningkatan kualitas aparatur.
- o Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat.

2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan catatan strategis

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas- tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
 - Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
 - Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan Pemerintahan dengan optimal.
 - Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.

- Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
 - Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
 - Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.
 4. Strategi Melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam bidang SPM (Standar Pelayanan Minimal) sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan pada umumnya serta target program OPD pada khususnya dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Nagari, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya .

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	Kec. Pangkalan Koto Baru	100 %	Rp 1.961.405.099	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	Kec. Pangkalan Koto Baru	100 %	Rp 1.741.402.828	
1.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja	Kec. Pangkalan Koto Baru	11 Dokumen	Rp 19.128.000	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja	Kec. Pangkalan Koto Baru	11 Dokumen	Rp 7.782.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pangkalan Koto Baru	2 Dokumen	Rp 4.741.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pangkalan Koto Baru	2 Dokumen	Rp 1.586.000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 2.054.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 1.230.000	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 1.374.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kec. Pangkalan Koto Baru	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD					Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 2.755.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	-	-	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 2.875.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	-	-	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	5 Laporan	Rp 5.329.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	5 Laporan	Rp 4.966.000	
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 1.672.289.691	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pangkalan Koto Baru			Rp 1.547.320.156	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangkalan Koto Baru	15 Orang / bulan	Rp 1.662.133.191	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangkalan Koto Baru	15 Orang / bulan	Rp 1.541.082.156	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan/ verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 Dokumen	Rp 6.774.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan/ verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 Dokumen	Rp 3.644.000	
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 3.382.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 Dokumen	Rp 2.594.000	
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp. 4.035.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp. 2.515.000	
01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	2 Laporan	Rp 4.035.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	2 Laporan	Rp 2.515.000	
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 15.460.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 10.700.000	
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Pangkalan Koto Baru	20 Paket	Rp. 10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Pangkalan Koto Baru	16 Paket	Rp. 8.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian		15 Dokumen	Rp 5.460.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian		15 Dokumen	Rp 2.700.000	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 106.732.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 75.591.000	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	10 paket	Rp 550.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	10 paket	Rp 550.000	
02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	2 paket	Rp 30.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 paket	Rp 14.585.000	
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 paket	Rp 9.845.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 paket	Rp 6.260.000	
04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 paket	Rp 4.971.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 paket	Rp 4.330.000	
05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 laporan	Rp 61.366.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 laporan	Rp 49.866.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 30.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai	Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 4.681.000	
02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	42 unit	Rp 30.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 unit	Rp 4.681.000	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 31.600.408	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 30.177.672	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Pangkalan Koto Baru	20 laporan	Rp 200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Pangkalan Koto Baru	20 laporan	Rp 200.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 laporan	Rp 10.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 laporan	Rp 8.700.000	
03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 laporan	Rp 21.400.408	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 laporan	Rp 21.277.672	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 54.210.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 62.636.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Pangkalan Koto Baru	7 unit	Rp 59.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Pangkalan Koto Baru	7 unit	Rp 60.050.000	
02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. Pangkalan Koto Baru	5 unit	Rp 4.060.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. Pangkalan Koto Baru	5 unit	Rp 2.586.000	
03	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peneliharaan Gedung Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Kec. Pangkalan Koto Baru	1 unit	Rp 18.200.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peneliharaan Gedung Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Kec. Pangkalan Koto Baru	-	-	
02						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 4.150.000	
2.01						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 4.150.000	
01						Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Perencanaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penurunan stunting	Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp. 4.150.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 88.585.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 33.170.000	
3.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 80.385.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 28.060.000	
01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa'	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kec. Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp 5.385.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kec. Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp 4.410.000	
02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kec. Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp 75.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kec. Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp 23.650.000	
3.02	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp. 8.200.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp. 5.110.000	
	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesejahteraan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup	Pembinaan kelompok Pemberdayaan keluarga serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Kec. Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp. 8.200.000	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesejahteraan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup	Pembinaan kelompok Pemberdayaan keluarga serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Kec. Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	Rp. 5.110.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	bersih dan sehat					bersih dan sehat					
04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 35.100.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec. Pangkalan Koto Baru		Rp 34.050.000	
5.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec. Pangkalan Koto Baru			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggara ya Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pangkala Koto Baru	Kec. Pangkalan Koto Baru			
01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 dokumen	Rp 35.100.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kec. Pangkalan Koto Baru	12 dokumen	Rp 34.050.000	
	Jumlah				Rp 2.085.090.099					Rp 1.812.772.828	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada Tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
- 2) Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Nagari;
- 3) Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
- 4) Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkopimca, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota, maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Kecamatan Pangkalan Koto Baru di Tahun 2026 tidak memiliki usulan program dan kegiatan dari pemangku Kepentingan.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Pusat Tahun 2026 meliputi :

1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan Kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan dan pendidikan
3. Revitalisasi industry dan penguatan reset terapan, penguatan daya saing usaha
4. Pemangunan rendah karbon dan transisi energi
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
6. Percepatan Pembangunan IKN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu atau hasil yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 mengacu kepada tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025–2029. Semua itu disusun agar sejalan dan mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu "**Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.**"

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pangkalan Koto Baru berperan penting dalam mendukung Misi ke-2 RPJMD Tahun 2025–2029, yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih". Peran ini diwujudkan melalui Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	66	67	68	69	69,50	70	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	91,30	91,50	91,75	91,80	92	
		Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	0	0	70	75	80	85	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan yang Berkelanjutan dan Terstruktur	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	0	0	70	75	80	85	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	80	81	82	83	84	85	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum secara Tertib, Terkoordinasi dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	50	60	70	75	80	85	



3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk Renja tahun 2026 mengacu kepada program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi Kepala daerah terutama visi ke 2 (dua) pada RPJMD 2025-2029 yaitu "**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**", yang diwujudkan melalui Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Terkait dengan program ini maka program pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru dikelompokkan ke dalam 4 program, yaitu program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Ringkasan Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.3
Program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1. Pengadaan Mebel

		Daerah	
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. 2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Tabel 3.4

**RANCANGAN AWAL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

NAMA OPD : Kecamatan Pangkalan Koto Baru
URUSAN : Urusan Kewilayahan

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
x	xx	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	Rp.1.961.405.099	DAU		70	Rp 2.094.335.099
x	xx	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	Rp 19.128.000	DAU	IKU OPD	70	Rp 19.808.000
x	xx	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	Rp 1.672.289.691	DAU	IKU OPD	70	Rp 1.772.289.691
x	xx	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	Rp 4.035.000	DAU	IKU OPD	70	Rp 4.035.000
x	xx	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	Rp 15.460.000	DAU	IKU OPD	70	Rp 15.460.000
x	xx	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	Rp. 106.732.000	DAU	IKU OPD	70	Rp 107.182.000
x	xx	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	Rp. 30.000.000	DAU	IKU OPD	70	Rp 30.000.000



x	xx	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	Rp 31.600.408	DAU	IKU OPD	70	Rp 31.600.408
x	xx	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	70	Rp 82.160.000	DAU	IKU OPD	70	Rp 113.960.000
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	100%	Rp 88.585.000	DAU		100%	Rp 29.000.000
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	100%	Rp 80.385.000	DAU	IKU OPD	100%	Rp 20.500.000
7	01	03	2.01	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	100%	Rp 8.200.000	DAU	IKU OPD	100%	Rp 8.500.000
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Maningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	96,30	Rp 35.100.000	DAU		96,30	Rp 38.000.000
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	96,30	Rp 35.100.000	DAU	IKU OPD	96,30	Rp 38.000.000
TOTAL								Rp. 2.085.090.099				Rp 2.161.335.099

Sarilamak, Februari 2025
CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

YUDHI SAPUTRA, SE,M.AP
NIP. 19800617 200501 1001



Sementara untuk subkegiatan prioritas Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.5
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
N	I	H	I	L

BAB IV

RENJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun program dan Kegiatan dalam perencanaan Renja OPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah sebagai berikut :

1. Mengutamakan pelayanan publik sebagai dasar terciptanya Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi;
 - a. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
 - c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (AKIP) .
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat menuju Lima Puluh Kota yang madani Madani Beradat dan Berbudaya.
 - a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - b. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari

Adapun Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalan Koto Baru disajikan pada Tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU						1.812.772.828,00								2.011.986.099,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.812.772.828,00							2.011.986.099,00		
	7.01	KECAMATAN						1.812.772.828,00							2.011.986.099,00		
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.741.402.828,00						-	1.933.301.099,00		
		[Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah]	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	1.741.402.828,00	-	-	-	-	-	-	1.933.301.099,00	-	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.782.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	12.124.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.586.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		4.741.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	



7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				16 Orang /bulan	1.541.082.156,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	1.662.133.191,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	3.644.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	4.774.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	2.594.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	3.382.500,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-					-	2.515.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	4.035.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU



7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				16 Dokumen	2.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		3.460.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-			-	75.591.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	107.182.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	550.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		1.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															



			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	14.585.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		30.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	6.260.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		9.845.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan																
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan</i>				12 Paket	4.330.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		4.971.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																



			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	49.866.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		61.366.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-					-	4.681.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	4.681.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		25.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					-	30.177.672,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah	-	-	33.650.408,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU



												Lingkungan					
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	62.636.000,00				-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	0,00	67.560,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				7 Unit	60.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-		63.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				6 Unit	2.586.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-		4.060.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU



2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	4.150.000,00								0,00	
		[1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. SAKIP]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 92	65.75 90.89	66 91	67 91.3	4.150.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	4.150.000,00					Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				4 Laporan	4.150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	33.170.000,00								43.585.000,00	
		[Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari]	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	85	80	80	81	33.170.000,00	-	-	-	-	-	-	43.585.000,00	-



7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	-	28.060.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	35.385.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				6 Lembaga Kemasyarakatan	4.410.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	5.385.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				2 Laporan	23.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	-	-	5.110.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan	-	-	8.200.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	



			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 Dokumen	34.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		35.100.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
JUMLAH								1.812.772.828,00						2.011.986.099,00	



Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Kec. Pangkalan Koto Baru Tahun 2026

No	Bidang Urusan	2026			2027			Ket
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.	4	12	1.812.772.828	6	18	2.011.986.099	
1.1	Kecamatan	4	12	1.812.772.828	6	18	2.011.986.099	



BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 yang mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029. Selain itu, acuan utama dalam penyusunan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 adalah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025-2029.

Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru memuat hal-hal yang terkait dengan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2025, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan disertai dengan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2026.

Penyusunan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru bertujuan untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam kerangka regulasi maupun keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam internal Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan antar perangkat daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian



tujuan, sasaran dan target Kecamatan Pangkalan Koto Baru serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Pangkalan Koto Baru secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 sesuai tugas dan fungsinya.
2. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yakni Renstra dan Renja serta perubahannya.
3. Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun Anggaran 2026.
4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 yang dilaksanakan secara triwulanan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 yang telah ditetapkan selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026 untuk kemudian dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026, dan diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Demikian Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026.

Ditetapkan di: Pangkalan
Pada tanggal : September 2025
CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

YUDHI SAPUTRA, SE,M.AP
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 19800617 200501 1 004

